KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : sudah cek langsung ke BPK, Akom: tidak ada kunker fiktif dewan
Tanggal : Sabtu, 21 Mei 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Sudah Cek Langsung Ke BPK

Akom: Tidak Ada Kunker Fiktif Dewan

KETUA DPR Ade Komarudin mencoba meyakinkan publik bahwa isu kunjungan kerja (kunker) fiktif Dewan tidak benar. Apalagi jika dikatakan ada kerugian negara sebesar Rp 945 miliar. Akom, sapaan Ade Komarudin, justru merasa heran isu itu menjadi sangat ramai.

Isu adanya kunker fiktif ini mencuat awal pekan lalu setelah Fraksi PDIP membuat surat edaran bernomor 104/F-PDIP/DPR-RI/2016 tertanggal 10 Mei 2016. Dalam surat itu, Fraksi PDIP meminta para anggotanya untuk membuat laporan lengkap pelaksanaan kunker. Di dalamnya juga disebutkan bahwa Sekjen DPR meragukan pelaksanaan kunker. Yang membuat heboh adalah adanya kutipan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa ada potensi kerugian negara sebesar Rp 945 miliar dari kunker fiktif itu.

Isu ini kemudian dikomentari ramai-ramai. Mulai dari para pengamat, KPK, sampai Wapres Jusuf Kalla ikut ngomong. Dari internal DPR, ada yang berjanji akan melakukan penelusuran, ada juga yang membantah mentah-mentah isu tersebut.

Akom, sedari awal sebenarnya sudah yakin tidak ada anggota DPR yang melakukan kunker fiktif. Namun, untuk tambah yakin, politisi Golkar ini menemui anggota BPK Prof Eddy Mulyadi Soepardi untuk meminta klarifikasi langsung dan membaca laporan BPK.

"Prof Eddy itu anggota BPK yang mendalami masalah ini. Saya sudah baca wawancaranya. Itu *nggak* tahu kok ada kata-kata (kunker fiktif). Itu dari mana?" ucap Akom di Gedung DPR, kemarin.

Karena itu, Akom tidak mau menanggapi isu-isu yang beredar di luar. Dia hanya berpegang pada penyataan BPK yang menegaskan tidak ada kunker fiktif. "Yang jadi patokan saya adalah BPK. Saya nggak mau patokan yang lain. Kalau memang ada fiktif menurut BPK, saya ikutin," cetusnya.

Agar isu ini tidak terulang kembali, Akom meminta semua anggota DPR tertib dalam membuat laporan kunker. Dengan begitu, semua kegiatan kunker terdata dengan baik di Setjen DPR. Hal itu juga akan memudahkan BPK dalam melakukan audit.

Untuk ketertiban pelaporan itu, Akom mengaku sudah menghubungi Sekjen DPR Winantuningtyastiti. "Sudah (menghubungi). Surat, telepon Ibu Sekjen. Sekarang, semakin banyak yang laporan," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman menerangkan, audit BPK terhadap Setjen DPR belum rampung. Sehingga, sampai saat ini belum bisa disimpulkan apakah ada kerugian negara atau tidak dalam kunker yang dilakukan pada anggota Dewan.

"Temuan itu bagian dari konfirmasi atas temuan yang ada. Hasilnya belum final. Finalnya awal Juni. Kami sedang berkomunikasi dengan pihak yang diperiksa tentang kelengkapan data," jelasnya, Rabu lalu.

Menurut Yudi, dalam surat awal BPK ke Setjen DPR, tidak pernah disebutkan ada kerugian negara atau potensi kerugian neagra. Dalam surat itu hanya dinyatakan harus ada pertanggungjawaban kegiatan bukan uang yang harus dipenuhi.

"Masih perlu diverifikasi ulang. Kegiatan itu belum dipertanggungjawabkan. Potensi yang keluar itu yang belum dipertanggungjawabkan, makanya perlu dilengkapi," ucapnya. ■ QAR

"Yang jadi patokan saya adalah BPK. Saya nggak mau patokan yang lain. Kalau memang ada fiktif menurut BPK, saya ikutin."